

Islam Kiri Dan Ideologi Pancasila: Menyikapi Sila Keadilan Sosial Dalam Perspektif Islam

Ana Sopanah¹, Salma Aulia Riyanti², Mohammad Bagas Rafif³, Dimas Meifal Nazry⁴,
Muhamad Parhan⁵

¹⁻⁵ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email : anasopanah@upi.edu¹, salmaaulia24@upi.edu², mbagasrafif@upi.edu³, memeifal@upi.edu⁴,
parhan.muhamad@upi.edu⁵

Korespondensi penulis: anasopanah@upu.edu *

Abstract: *This article explores the relationship between the concept of Leftist Islam (Islam Kiri) and the fifth principle of Pancasila, namely "Social Justice for All Indonesian People," in an effort to understand how progressive Islamic values can synergize with the national ideology. Leftist Islam, as a school of thought that emphasizes economic justice, advocacy for the oppressed, and critique of capitalism, shares significant intersections with the spirit of social justice embodied in Pancasila. Through normative and historical analysis, this article traces the roots of Leftist Islamic thought and examines how progressive Muslim figures in Indonesia, from the independence era to the present, have sought to interpret Islamic values within the framework of the Pancasila state. The article concludes that the principle of social justice is not only compatible with Islamic teachings, but can also be strengthened through interpretations of Islam that side with the marginalized and the poor. Therefore, the integration of Leftist Islam and Pancasila opens a constructive ideological dialogue for the advancement of social justice in Indonesia.*

Keywords: *Leftist Islam, Pancasila, Social Justice, Ideology, Progressive Islam, State*

Abstrak: Artikel ini membahas keterkaitan antara gagasan Islam Kiri dan sila kelima dalam Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dalam upaya memahami bagaimana nilai-nilai Islam progresif dapat bersinergi dengan ideologi negara. Islam Kiri, sebagai sebuah pendekatan pemikiran yang mengedepankan keadilan ekonomi, pembelaan terhadap kaum tertindas, dan kritik terhadap sistem kapitalisme, memiliki irisan penting dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila. Melalui kajian normatif dan historis, artikel ini menelusuri akar-akar pemikiran Islam Kiri, serta bagaimana tokoh-tokoh Islam progresif Indonesia sejak era kemerdekaan hingga kontemporer mencoba menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kerangka negara Pancasila. Artikel ini menyimpulkan bahwa sila keadilan sosial tidak hanya kompatibel dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat diperkuat melalui interpretasi Islam yang berpihak pada kaum lemah dan marjinal. Dengan demikian, integrasi antara Islam Kiri dan Pancasila membuka ruang dialog ideologis yang konstruktif bagi penguatan keadilan sosial di Indonesia.

Kata kunci: Islam Kiri, Pancasila, Keadilan Sosial, Ideologi, Islam Progresif, Negara.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan ras yang sangat luar biasa. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Islam sebagai agama yang universal tidak hanya membahas aspek spiritual, tetapi juga mencakup tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Dalam Indonesia itu sendiri, Ideologi Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi suatu landasan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia menjadi nilai-nilai yang mendasari berbagai aspek kehidupan dalam

bermasyarakat rakyat Indonesia itu sendiri (Aurora, 2024). Pancasila dianggap sebagai ideologi bangsa Indonesia, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan berfungsi sebagai dasar bagi keberlangsungan bernegara. Dengan kata lain, tujuan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah mewujudkan kehidupan yang bersifat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ber- Kerakyatan, dan ber- Keadilan (Anang, dkk, 2023). Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Keadilan sosial sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia. Tujuan dari hak asasi manusia adalah untuk memberikan hak-hak dasar bagi mereka sebagaimana mestinya. Hak-haknya dapat mencakup hak ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya tanpa membedakan agama, ras, atau bangsa (Idris, dkk, 2023). Dalam islam itu sendiri, keadilan merupakan asas yang perlu dijunjung tinggi karena Allah itu sendiri memiliki sifat Maha Adil yang semestinya di contoh oleh setiap umat-Nya. Sejalan dengan Ideologi Pancasila yang juga mengedepankan keadilan, Islam menginginkan setiap umatnya untuk menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan mendapatkan kebutuhan dasar mereka, yaitu keselamatan agamanya, keselamatan jiwa, raga, dan kehormatannya, keselamatan akalanya, serta keselamatan harta bendanya (Prasetya, 2021). Selain itu, Islam juga mendorong pemimpin dan penguasa untuk bertindak adil serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kelompok tertentu. Namun, dalam realitanya masih banyak terjadi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi masalah yang berkelanjutan. Kelompok masyarakat yang tersisihkan, seperti buruh, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin di kota, serta minoritas ras dan agama, sering kali masih menghadapi diskriminasi yang dapat menghambat akses mereka menuju kesejahteraan. Ada begitu banyak kasus mengenai ketidakadilan di negara ini, seperti, diskriminasi terhadap perempuan yang dimana perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam berbagai aspek seperti kehidupan, pendidikan, dan politik. Perempuan sering kali dianggap kurang kompeten dibanding laki-laki. Selanjutnya kaum minoritas yang ada di suatu wilayah sering kali masih terasingkan dan tertindas sehingga mereka merasa tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan (Saputri, 2022). Di sisi lain, dalam pemikiran Islam, terdapat konsep Islam Kiri, yaitu cara berpikir yang berorientasi pada keberpihakan kepada kaum tertindas dan penolakan terhadap sistem yang menindas. Paradigma Islam Kiri lahir dari gagasan bahwa Islam harus menjadi kekuatan pembebasan bagi mereka yang tertindas. Islam mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, terbuka dalam menerima keberagaman yang ada, yang menjadikan perbedaan tersebut bukan sebagai suatu penghalang untuk menjalin kerjasama atas asas kemanusiaan (Fauzi, 2023).

Sejarah Islam menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap nasib kaum tertindas. Dalam banyak hadis dan peristiwa sejarah, Islam hadir untuk membebaskan budak, memperjuangkan hak-hak perempuan, serta memberikan perlindungan kepada kaum miskin. Islam menolak segala bentuk penindasan dan menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan yang merata (Juliyati, dkk, 2025). Islam Kiri juga mengajarkan bahwa kaum tertindas harus diberikan ruang dan kesempatan untuk bangkit serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan dapat diterapkan dalam kebijakan publik, seperti peraturan yang melindungi hak-hak buruh, program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, serta sistem distribusi kekayaan yang lebih merata. Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan ekonomi semata, tetapi juga membutuhkan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap keadilan. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan mengenai spiritual saja, tetapi juga memberikan sebuah sistem nilai yang menekankan keberpihakan kepada kaum tertindas. Artikel ini akan membahas mengenai keterkaitan antara Islam Kiri dan sila keadilan sosial dalam Pancasila, bagaimana Islam Kiri dapat dipadukan dengan Ideologi Pancasila dalam konteks keadilan sosial. Selain itu, artikel ini akan menyoroti bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin dapat berperan dalam memperjuangkan hak-hak kaum bagi kaum tertindas. Dengan mengkaji perspektif Islam terhadap keadilan dan keberpihakan kepada kaum tertindas, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman mengenai hubungan antara Islam, Pancasila, dan keadilan sosial, serta bagaimana mengatasi masalah penindasan dalam negeri.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Pemikiran Islam Kiri

Pemikiran *Islam Kiri* merupakan pendekatan ideologis dalam Islam yang menekankan keberpihakan terhadap kaum tertindas (*mustadh'afin*), penolakan terhadap kapitalisme yang eksploitatif, serta perjuangan terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memadukan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan semangat revolusioner untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara.

Menurut Wahidin et al. (2025), Islam Kiri mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam, termasuk dalam konteks hukum, ekonomi, politik, dan sosial, untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendekatan ini menyoroti isu-isu kontemporer seperti distribusi kekayaan, hak asasi manusia, perlindungan terhadap

kelompok marjinal, serta kebijakan ekonomi berbasis syariah sebagai bentuk implementasi keadilan sosial. Prasetyo (2023) dalam bukunya "Islam Kiri: Jalan Menuju Revolusi Sosial" menekankan bahwa Islam Kiri adalah gerakan intelektual yang muncul sebagai kritik terhadap sistem kapitalisme yang menindas dan eksploitatif, serta berpihak pada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Pemikiran ini berakar dari sejarah perjuangan anti-kolonial di dunia Muslim, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Islam Kiri memiliki akar sejarah yang kuat, terutama melalui organisasi seperti Sarekat Islam yang dipimpin H.O.S. Tjokroaminoto. Menurut Tjokroaminoto (2021), sosialisme Islam yang dikemukakannya merupakan sosialisme yang telah berjalan sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Madjid (2023) juga mengemukakan bahwa ide sosialisme sudah terdapat dalam ajaran agama Islam, dan seorang Muslim haruslah sekaligus seorang sosialis. Konsep sosialisme religius ini menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang bersumber dari ajaran Islam. Dengan demikian, pemikiran Islam Kiri bukanlah bentuk radikalisme, tetapi sebuah pendekatan teologis-sosiologis yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar etika sosial untuk menghapuskan penindasan dan memajukan kesejahteraan rakyat.

B. Integrasi Pemikiran Islam Kiri dan Ideologi Pancasila dalam Perspektif Keadilan Sosial

Dalam mengkaji hubungan antara Islam dan ideologi negara Indonesia, sejumlah literatur telah memperlihatkan adanya titik temu antara nilai-nilai Islam progresif dan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila kelima: *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Perspektif Islam Kiri menjadi salah satu pendekatan yang cukup relevan dalam memahami peran agama dalam memperjuangkan keadilan sosial di tengah masyarakat yang kompleks. Menurut Bayat (2007), Islam Kiri adalah sebuah gerakan intelektual yang muncul sebagai kritik terhadap sistem kapitalisme yang menindas dan eksploitatif, serta berpihak pada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Pemikiran ini berakar dari sejarah perjuangan anti-kolonial di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, di mana tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto memperkenalkan sosialisme Islam melalui Sarekat Islam (Rahardjo, 2010). Lebih jauh, Esposito (2016) dan Shariati (1980) menekankan bahwa ajaran Islam memuat prinsip-prinsip keadilan sosial (al-‘adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam hal ini, zakat, larangan riba, dan tanggung jawab sosial merupakan bentuk nyata dari solidaritas sosial Islam yang menolak eksploitasi

ekonomi. Sementara itu, sila kelima Pancasila juga menegaskan pentingnya keadilan yang merata dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Aurora (2024) dan Anang dkk. (2023) menyatakan bahwa Pancasila mengandung semangat untuk menghapuskan kesenjangan sosial, diskriminasi, dan dominasi elite, serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil. Fauzi (2023) dan Juliyati dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam progresif mengedepankan pembelaan terhadap kaum mustadh'afin (tertindas), sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan hak-hak budak, perempuan, dan fakir miskin. Konsep ini menjadi landasan gerakan sosial Islam yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Kekinian, tantangan terhadap keadilan sosial di Indonesia masih berlangsung, seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas, serta kurangnya akses terhadap layanan publik (Saputri, 2022). Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai Islam Kiri dan sila keadilan sosial Pancasila menjadi strategi ideologis yang potensial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji hubungan antara paradigma Islam kiri dan ideologi Pancasila dalam konteks keadilan sosial serta keberpihakan terhadap kaum tertindas. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Pada pendekatan Kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15) Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian (Siahaan,C.,Lia, A.P.,&Adrian, D. 2022). Studi literatur ini bertujuan untuk menggali pemikiran-pemikiran teoretis yang mendasari kedua paradigma tersebut dan bagaimana keduanya dapat saling berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan sosial yang inklusif dan adil. Peneliti akan membandingkan kedua paradigma tersebut dengan fokus pada aspek-aspek yang mendukung upaya pemberdayaan kaum tertindas, baik dalam konteks teori maupun implementasi praktis dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Penelitian ini juga akan mensintesis pemikiran dari berbagai sumber untuk menunjukkan relevansi dan sinergi antara Islam kiri dan Pancasila dalam mewujudkan cita-cita sosial yang lebih adil.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana dua paradigma besar ini dapat saling melengkapi dalam memperjuangkan keadilan sosial dan memperkuat keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya diskursus sosial-politik tentang integrasi antara ideologi agama dan negara dalam konteks Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam Kiri muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi dalam sistem kapitalis, dengan menekankan keberpihakan kepada kaum tertindas serta kritik terhadap sistem ekonomi yang tidak adil. Pemikiran ini berakar pada perjuangan anti-kolonial dan pembebasan sosial di dunia Muslim, termasuk Indonesia, di mana tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto memperkenalkan konsep sosialisme Islam melalui Sarekat Islam. Islam Kiri memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, terutama terkait keadilan sosial (*al-'adl*) dan kesejahteraan umat (*maslahah*), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al Qur'an dan hadis yang menekankan distribusi kekayaan yang adil, zakat, serta larangan eksploitasi ekonomi.

Keadilan sosial tidak hanya menjadi prinsip utama dalam Islam, tetapi juga merupakan inti dari sila kelima Pancasila. Dalam Islam, konsep keadilan (*al-'adl*) berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, dan Al-Qur'an secara eksplisit menyerukan umat Islam untuk berlaku adil, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok (QS. An-Nisa: 135). Prinsip ihsan dalam Islam juga menuntut agar keadilan diwujudkan dengan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Sementara itu, sila ke-5 Pancasila menuntut negara untuk memastikan distribusi ekonomi yang adil, kesetaraan hak dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi seluruh rakyat, serta menekankan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan segelintir orang (Aurora, 2024; Anang dkk, 2023).

Islam sejak awal telah menempatkan kaum dhuafa sebagai kelompok yang harus dilindungi dan diperjuangkan hak-haknya. Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin yang membela hak-hak kaum tertindas, termasuk budak, perempuan, dan fakir miskin. Konsep *mustadh'afin* (kaum tertindas) menjadi landasan gerakan sosial dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Ma'un yang mengkritik mereka yang mengabaikan kesejahteraan sosial dan tidak peduli pada kaum miskin. Di Indonesia, keberpihakan Islam terhadap kaum tertindas tercermin dalam berbagai gerakan sosial Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang aktif dalam memperjuangkan hak buruh, petani, serta menyediakan

layanan pendidikan dan kesehatan bagi rakyat kecil (Fauzi, 2023; Juliyati dkk, 2025). Namun, dalam realitas sosial Indonesia, masih banyak terjadi ketimpangan ekonomi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok marjinal seperti buruh, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, serta minoritas ras dan agama (Saputri, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, integrasi antara Islam Kiri dan Pancasila dapat menjadi solusi strategis, di mana prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam kebijakan publik, seperti perlindungan hak buruh, program pemberdayaan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, Islam Kiri dan Pancasila memiliki titik temu dalam memperjuangkan keadilan sosial dan melawan eksploitasi terhadap kelompok marjinal, serta membuka ruang dialog ideologis yang konstruktif untuk memperkuat keadilan sosial di Indonesia.

Islam Kiri muncul sebagai bagian dari gerakan intelektual yang menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi dalam sistem kapitalis (Bayat, 2007). Pemikiran ini berkembang dalam konteks perjuangan anti-kolonial dan pembebasan sosial di berbagai negara Muslim, seperti Iran, Mesir, dan Indonesia (Rahardjo, 2010). Di Indonesia, Islam Kiri banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto yang memperkenalkan ide sosialisme Islam dalam Sarekat Islam. Islam Kiri memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam mengenai keadilan sosial (*al-'adl*) dan kesejahteraan umat (*maslahah*). Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, zakat, dan larangan terhadap eksploitasi ekonomi. Dalam pemikiran tokoh seperti Ali Shariati, sosialisme Islam bukan hanya sekadar sistem ekonomi, tetapi juga upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan (Shariati, 1980). Islam Kiri memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam mengenai keadilan sosial (*al-'adl*) dan kesejahteraan umat (*maslahah*). Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, zakat, dan larangan terhadap eksploitasi ekonomi (Esposito, 2016). Dalam pemikiran tokoh seperti Ali Shariati, sosialisme Islam bukan hanya sekadar sistem ekonomi, tetapi juga upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan (Shariati, 1980).

Sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memiliki semangat yang sama dengan nilai-nilai Islam dalam mengupayakan kesejahteraan bersama. Keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya berbicara tentang distribusi ekonomi, tetapi juga kesetaraan hak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dalam praktiknya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Oleh karena itu, Islam dan Pancasila

memiliki titik temu dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial dan melawan eksploitasi terhadap kelompok marginal.

Islam sejak awal telah menempatkan kaum dhuafa sebagai kelompok yang harus dilindungi dan diperjuangkan hak-haknya. Rasulullah ﷺ dalam perjalanan dakwahnya dikenal sebagai pemimpin yang membela hak-hak kaum tertindas, termasuk budak, perempuan, dan fakir miskin. Dalam Surah Al-Ma'un, Allah mengkritik orang-orang yang mengabaikan kesejahteraan sosial dan enggan membantu kaum miskin. Konsep mustadh'afin (kaum tertindas) dalam Islam menjadi landasan bagi gerakan sosial yang menekankan pentingnya pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang mengalami ketidakadilan struktural.

Dalam konteks Indonesia, keberpihakan Islam terhadap kaum tertindas dapat ditemukan dalam berbagai gerakan sosial Islam yang berfokus pada advokasi hak buruh, petani, dan pekerja informal. Organisasi-organisasi berbasis Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan gerakan filantropi. Dengan demikian, Islam tidak hanya berbicara tentang keimanan individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak kaum marginal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah dan ajaran Islam menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan kelompok tertindas, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh Islam progresif di Indonesia. Namun, realitas sosial di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan diskriminasi terhadap kelompok marginal, seperti buruh, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, serta minoritas ras dan agama. Integrasi antara Islam Kiri dan Pancasila dipandang sebagai sebuah solusi strategis untuk memperkuat kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial, seperti perlindungan hak buruh, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, dialog ideologis antara Islam Kiri dan Pancasila tidak hanya memperkaya diskusi sosial-politik di Indonesia, tetapi juga membuka peluang konkret untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, D. I., Adibah, L. N., & Toniek, D. I. V. (2023). Pancasila sebagai ideologi yang khas dan identitas bangsa Indonesia. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.36456/p.v3i1.7191>
- Aurora, D. (2024). Pancasila dan keadilan sosial dalam konteks Indonesia kontemporer. CV. Cendekia Utama.
- Aurora, P. A. (2024). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 4(1). <https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/3503>
- Bayat, A. (2007). *Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn*. Stanford University Press.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design*. Sage Publications.
- Esposito, J. L. (2016). *Islam: The straight path*. Oxford University Press.
- Fauzi, A. (2023). Islam kiri dan perjuangan kaum tertindas di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Agama*, 15(2), 211–225.
- Fauzi, M. (2023). Aktualisasi nilai-nilai moderasi dalam pandangan Islam. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 7(2), 123–135. <https://doi.org/10.32332/tapis.v7i2.4052>
- Idris, I., Arief, A., & Saihu, M. (2023). Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 57–75. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214>
- Juliyati, Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2025). Kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(1).
- Madjid, N. (2023). Keadilan menurut Nurcholish Madjid dan relevansinya di Indonesia dewasa ini. UIN Jakarta.
- Prasetya Rini, N. (2021). Keadilan sosial dalam perspektif filsafat Islam. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Prasetyo, E. (2023). *Islam kiri: Jalan menuju revolusi sosial*. Resist Book.
- Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-zakah: A comparative study*. Islamic Book Trust.
- Rahardjo, M. D. (2010). *Islam kiri dan transformasi sosial di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Saputri, R. (2022). Diskriminasi sosial dan tantangan keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 77–89.
- Saputri, S. R. (2022). *Ketidakadilan hukum Indonesia: Kasus kakek pemungut sisa getah*.

- Shariati, A. (1980). *Islamic sociology*. Islamic Publications.
- Siahaan, C., Lia, A. P., & Adrian, D. (2022). Studi literatur: Media sosial “TikTok” dan pembentukan karakter remaja. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4939–4950.
- Tjokroaminoto, H. O. S. (2021). *Political thought (Sosialisme Islam) ala H.O.S. Tjokroaminoto*. KSE UIN Jakarta.
- Wahid, A. (2001). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, masyarakat, negara demokrasi*. The Wahid Institute.
- Wahidin, L. O., Sholihah, H., Rifa’i, M., Gadafi, M., Nugroho, R. S., Amane, A. P. O., Mustopa, A., Halik, H., & Jalil, A. (2025). *Islam dan keadilan sosial: Perspektif teologis dan praktis*. CV. Gita Lentera.